

SAAT-SAAT KRITIS BAHASA CIA-CIA

Iqbal Nurul Azhar*

Abstract: Cia-Cia language is one of endangered local languages. Its status as a local language along with the bad condition of its speakers put this language in a highly risk of extinction. The latest policy issued by Bau-Bau's government to teach Hangeul writing system to Cia-cia people have worsen Cia-Cia's condition. Not only the policy is so controversial, but also can speed up the extinction process of Cia-cia language. This papers aims to expose how danger it is to let the Bau-Bau's government continue the policy. Once the policy launched, we may count the Cia-Cia's extinction time backward.

Keyword: Cia-cia, Hangeul, Letter

Pendahuluan

Kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup bahasa-bahasa di dunia dapat dirasakan akhir-akhir ini. Kekhawatiran ini muncul sebagai respon dari adanya sejumlah laporan penelitian yang berkenaan dengan kondisi memprihatinkan bahasa-bahasa lokal di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa puluhan bahasa lokal yang tersebar di seluruh dunia telah mengalami kepunahan, sedang puluhan lainnya berada dalam kondisi memprihatinkan dan nyaris punah. Seakan mendukung sejumlah laporan tersebut, Delby (dalam Hakim, 2002: 25-255) memprediksikan bahwa pada abad ke-21, hampir separuh dari sekitar 5000 bahasa-bahasa di dunia terancam punah.

Entah memiliki hubungan atau tidak dengan pernyataan Delby, UNESCO, pada pertemuan tahun 2003 membahas tentang program penyelamatan bahasa-bahasa yang terancam punah. Pembahasan penyelamatan bahasa-bahasa oleh UNESCO ini menjadi bukti bahwa persoalan bahasa-bahasa lokal telah menjadi tanggungjawab dunia internasional. Masyarakat internasional menyadari bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia pada hakikatnya adalah warisan budaya nenek moyang yang tak ternilai harganya sehingga upaya melestarikannyapun harus dilaksanakan dengan seksama dan serius. Kesadaran akan bahaya hilangnya suatu bahasa menjadi penting karena pada esensinya hilangnya sebuah bahasa yang ada di penjuru dunia manapun berarti hilangnya pula warisan nilai-nilai budaya suatu kelompok masyarakat yang ada di tempat tersebut.

Sayangnya, rencana-rencana dan teori-teori di atas kertas untuk menyelamatkan bahasa-bahasa yang terancam punah berbeda jauh dengan pelaksanaannya. Meskipun rencana-rencana penyelamatan ini telah digagas pada tahun 2003, fakta-fakta tentang punahnya bahasa-bahasa di dunia tidak pernah berkurang bahkan semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 2007, *National Geographic* menunjuk bahwa ada lima kawasan di dunia sedang mengalami kepunahan bahasa yang begitu

* Iqbal Nurul Azhar adalah dosen Program Studi Sastra Inggris FISIB Universitas Trunojoyo Madura

besar. Kawasan-kawasan tersebut adalah Siberia Timur, Australia Utara, Amerika Selatan bagian tengah, Oklahoma di Amerika Serikat, dan Pasifik Barat laut di Amerika Serikat (Kompas, 21 September 2007). Kisah menyedihkan inipun bahkan diperkuat oleh prediksi UNESCO yang dikeluarkan di tahun yang sama dalam kongres internasional bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan tahun 2007. Pada kongres tersebut itu UNESCO memprediksi bahwa enam hingga sepuluh bahasa lokal tiap tahunnya akan punah. Prediksi ini berpijak pada sejumlah fakta yang menyebutkan bahwa beberapa pemerintah negara-negara di dunia telah mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan bahasa lokal yaitu hanya diijinkannya penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa komunikasi formal rakyat negara-negara tersebut.

Kekhawatiran yang sama akan punahnya bahasa-bahasa lokal terjadi juga di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, Indonesia memiliki setidaknya 743 bahasa daerah (SIL, 2006). Banyaknya bahasa-bahasa daerah ini ditambah oleh rendahnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap hidup-matinya bahasa daerah, menyebabkan angka kepunahan bahasa daerah yang tinggi sangat mungkin terjadi. Ada beberapa fakta-fakta penelitian yang menjelaskan tentang sekarat atau matinya bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Fakta-fakta ini tergambar dalam data di bawah ini:

- a. Mukhamdanah (2010: 77-83) menyebutkan bahwa di Papua, dari 273 bahasa daerah yang ada di daerah tersebut, 8 diantaranya telah punah. Di Maluku ada 2 bahasa telah punah. Di Maluku Utara, ada 1 bahasa telah punah
- b. Collins (2006:3) melaporkan bahwa bahasa Amahai (di Maluku) yang dulu dituturkan di Makaraki, Amahai, dan Ruta pada tahun 70-an, kini hanya dituturkan di Ruta. Itupun hanya oleh penutur berusia 40 tahun ke atas. Collin lewat laporannya seakan-akan menyatakan bahwa bahasa Amahai sedang menunggu detik-detik kematiannya.
- c. Musgrove (dalam Collin, 2006) melaporkan telah terjadi kemerosotan penggunaan bahasa Tulehu. Pada tahun 1979 generasi muda Tulehu atau anak-anak di bawah umur 10 tahun sudah tidak sanggup lagi menggunakan bahasa Tulehu. Hal yang sama terjadi juga pada bahasa Nakaela, Hulung, Paulohi, dan bahasa Kamarian. Penutur bahasa ini bahkan tidak lebih dari 10 orang.
- d. Collins (2006:8) melaporkan bahwa tiga bahasa telah punah yaitu bahasa Ternate-no, Palumata, dan bahasa Moksel. Ia juga melaporkan bahwa penduduk Lembah Embau di sungai Embau di pedalaman Kalimantan Barat sudah kehilangan bahasanya secara total tanpa bekas yang dapat ditelusuri.
- e. Yamaguchi (2006:11) melaporkan bahwa bahasa Tangkou di Sulawesi juga merupakan bahasa yang terancam punah
- f. Arief Rahman (dalam Darwis, 2007: 353) memetakan kepunahan bahasa-bahasa daerah sebagai berikut; dari 52 bahasa di Kalimantan, satu diantaranya terancam punah, Sumatera 13 bahasa dua terancam punah dan satu telah punah, Sulawesi 110 bahasa, 22 terancam punah dan 11 sudah punah. Timor, Flores, Bima dan Sumba 50 bahasa, 22

terancam punah. Papua dan Halmahera 271 bahasa, 56 terancam punah. Di Papua dan Halmahera bahkan ada yang mengatakan 9 bahasa telah punah

- g. Firmansyah, (2010:530-535) menyebutkan bahwa bahasa Komerling sedang berada dalam ancaman. Hal ini ditandai dengan tidak digunakannya lagi aksara Komerling yang disebut Ka-Ga-Nga.
- h. Demikian juga bahasa Tandia yang dituturkan di distrik Rasie, kabupaten Teluk Wondama (Mukhammadah, 2010: 77-83), dinyatakan berada dalam masa-masa kritis yang disebabkan penuturnya cenderung meninggalkan bahasa daerah mereka dan beralih ke bahasa Wandamen.

Fakta terakhir tentang kekhawatiran akan punahnya bahasa lokal yang menjadi menjadi kontroversi terhangat adalah fakta kasus bahasa Cia-Cia. Kasus Cia-Cia ini menjadi kasus yang ramai dibicarakan orang karena melibatkan tidak hanya pemerintah Indonesia sebagai pemilik bahasa lokal tersebut, tapi juga pemerintah Korea yang demikian tertarik untuk mempromosikan aksara Korea dengan cara mengawinkan bahasa Cia-Cia dengan huruf Korea. Berdasarkan kehangatan isu inilah, maka artikel ini mengulas kasus bahasa Cia-Cia sebagai bahan kajian utama.

Faktor-faktor Penyebab Punahnya Sebuah Bahasa

Selain menemukan beberapa bahasa sedang sekarat dan berapa diantaranya telah punah, beberapa peneliti juga menemukan beberapa faktor penyebab dari sekarat atau punahnya bahasa-bahasa tersebut. Ada empat faktor yang dominan bermain dibalik masalah sekarat atau punahnya bahasa-bahasa lokal yaitu: (1) faktor penutur, (2) faktor kondisi sosial masyarakat, (3) faktor internal bahasa, dan (4) faktor kebijakan pemerintah.

Faktor pertama yaitu faktor penutur. Faktor ini berhubungan dengan kondisi fisik penutur serta aspek-aspek mental yang dimiliki penutur seperti sikap dan persepsi penutur terhadap bahasa yang dituturkannya. Faktor penutur ini tercakup dalam beberapa hal antara lain: (1) terjadi bencana alam yang membunuh seluruh penutur sebuah bahasa sehingga bahasa tersebut tidak memiliki penutur lagi, (2) penutur bahasa melakukan migrasi besar-besaran ke sebuah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang bertutur bahasa berbeda, sehingga pada akhirnya karena merasa *inferior*, penutur bahasa menggunakan bahasa penduduk lokal daerah tersebut sebagai bahasa pergaulan, sedang bahasanya sendiri dijadikan sebagai bahasa keluarga yang digunakan secara terbatas, (3) orang tua yang cenderung mendorong anaknya mempelajari bahasa lain karena faktor prestise, trend dan faktor-faktor lainnya, menyebabkan sang anak secara perlahan-lahan meninggalkan bahasa ibunya karena merasa malu (Grimes, 2009), (4) adanya kesalahan dalam *cross cultural understanding* (pemahaman lintas budaya) yaitu kesalahan dalam pemahaman lintas budaya, menyebabkan generasi muda meninggalkan bahasa Ibu mereka. Kesalahan lintas budaya ini muncul dalam bentuk stereotipe-stereotipe yang melekat pada beberapa suku lokal, seperti suku Batak dan suku Madura. Dua suku ini diberi gelar negatif sebagai kelompok masyarakat yang keras, temperamental, tukang berkelahi dan tukang kawin lagi. Cap ini membuat warga dua suku tersebut

kemudian berusaha untuk berubah dengan cara menghilangkan salah satu identitas diri yaitu bahasa ibu mereka, (5) adanya perkawinan antarsukupun yang dapat mendorong bahwa salah satu penutur bahasa lokal akan mengalah dan berhenti menggunakan bahasa lokalnya untuk kemudian beralih menggunakan bahasa pasangannya, atau kedua-duanya meninggalkan bahasa ibu mereka dan beralih menggunakan bahasa Nasional menyebabkan bahasa-bahasa yang ditinggalkan akan menjadi punah.

Faktor kedua yaitu faktor kondisi sosial masyarakat. Faktor ini berhubungan dengan kondisi perkembangan lingkungan sebuah bahasa dituturkan. Sebuah daerah yang kondisi sosial masyarakatnya cenderung berubah secara drastis yang disebabkan oleh hal-hal seperti perang, urbanisasi, industrialisasi, resesi ekonomi akut, dan faktor-faktor ekstrem lainnya, akan dapat menyebabkan masyarakat secara perlahan ataupun cepat meninggalkan bahasa ibunya untuk dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi kurang bersahabat tersebut. Sebagai contoh bahasa Ibrani yang dituturkan oleh orang-orang Yahudi nyaris musnah dari dunia karena penuturnya mengalami hal-hal ekstrem di atas yaitu perang dan eksodus besar-besaran (Fishman dalam Gunarwan, 2005).

Faktor internal bahasa menjadi faktor ketiga yang dapat mempengaruhi hidup matinya sebuah bahasa. Beberapa aspek internal bahasa ternyata dapat menjadi penyebab sebuah bahasa musnah, antara lain: (1) sebuah bahasa yang tidak mendapatkan label *official* (resmi) sebuah daerah, maka bahasa tersebut selamanya akan berada dalam ancaman. Bahasa *official* cenderung digunakan secara luas, sedang bahasa *nonofficial* (lokal) cenderung digunakan dalam situasi yang terbatas dan pada akhirnya ditinggalkan, (2) sebuah bahasa yang tidak memiliki sistem tulis (seperti bahasa Cia-Cia) kurang terjamin daya hidupnya, mengingat konservasi sebuah bahasa membutuhkan bantuan artefak-artefak tulis yang dapat mendokumentasikan seluruh aspek-aspek linguistik bahasa tersebut, (3) sebuah bahasa yang memiliki sistem linguistik yang tidak teratur dan tidak terkodifikasi secara formal dapat menyebabkan para generasi muda penutur bahasa tersebut atau orang luar yang tertarik belajar bahasa tersebut menjadi enggan mempelajari bahasa tersebut karena adanya kesulitan-kesulitan yang ditemui pada saat proses pembelajaran yang berhubungan dengan aspek-aspek kebahasaan yang telah disebutkan di atas.

Faktor keempat adalah faktor kebijakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah yang terlalu menuntut generasi mudanya untuk dapat menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa asing lainnya seperti Mandarin dan Arab, menyebabkan para generasi muda secara perlahan-lahan meninggalkan bahasa ibu mereka dan beralih pada bahasa yang dituntutkan pemerintah tersebut. Pemerintah pusat maupun pemerintah lokal yang tidak memiliki undang-undang yang mengatur aspek-aspek kebahasaan tentunya tidak dapat diharapkan untuk menjaga keberlangsungan bahasa lokal. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki undang-undang tentang kebahasaan namun tidak meletakkannya sebagai prioritas utama pembangunan juga tidak dapat diharapkan untuk dapat melestarikan bahasa. Di Indonesia, kondisi yang disebutkan terakhir inilah yang terjadi.

Pemerintah pusat sebenarnya memiliki Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 32 yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa. Pemerintah daerahpun juga memiliki Undang-Undang No. 22 tahun 1999 atau Undang-undang kebahasaan No. 24 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah daerah untuk memajukan bahasa daerah. Dua hukum formal di atas sebenarnya telah lebih dari cukup untuk menjadi landasan yang dapat dipakai dalam memajukan dan mempertahankan bahasa-bahasa lokal di daerah-daerah. Namun seperti yang telah disebutkan di atas, meskipun pemerintah pusat dan daerah memiliki undang-undang yang mengatur bahasa daerah, masalah konservasi dan pengembangan bahasa masih belum menjadi prioritas utama pembangunan sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan secara taktis dan sistematis konservasi bahasa-bahasa lokal masih belum ada wujud nyatanya.

Empat faktor yang menjadi penyebab punahnya bahasa-bahasa Ibu, ternyata hampir seluruhnya ada dan dijumpai bermain dalam kasus bahasa Cia-Cia. Dari aspek internal penutur, bahasa Cia-Cia dituturkan oleh penutur minor (jumlahnya sedikit dan letaknya di daerah perifer) sehingga sangat rentan untuk mengikuti kalangan mayor yang menghegemoni trend, hiburan dan informasi. Dari segi sosial budaya, aspek ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi menyebabkan migrasi ke tempat lain dapat saja terjadi. Dari aspek internal bahasapun, bahasa Cia-Cia tidak memiliki aksara yang dianggap sanggup merepresentasikan bahasa Cia-Cia lisan, sehingga bahasa inipun rentan untuk punah. Demikian juga dari aspek keempat yaitu pemerintah, meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang konservasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia (termasuk juga bahasa Cia-Cia), namun karena masalah ini belum mejadi masalah yang masuk ke dalam pilar-pilar pokok pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, langkah-langkah strategis dan konkret masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan perhitungan terhadap faktor-faktor pemusnah bahasa ibu inilah dapat disimpulkan bahwa bahasa Cia-Cia rentan untuk punah meskipun waktunya tidak dapat dipastikan kapan.

Kebijakan pemerintah Bau-Bau menerima tawaran pemerintah Korea untuk dapat mengajarkan aksara Hangeul dengan timbal balik promosi dan bantuan ekonomi dinilai tidak hanya antikonservasi bahasa Cia-Cia, tapi sekaligus juga dapat mempercepat bahasa tersebut untuk punah.

Bahasa Cia-Cia dan Abjad Korea: Kasus Kontrakonservasi yang Problematis

Bahasa Cia-Cia merupakan salah satu bahasa lokal atau bahasa etnik yang ada di Indonesia. Bahasa ini dituturkan oleh etnis Cia-Cia yang sebagian besar tinggal di Kecamatan Sorowalio Kota Bau-Bau. Etnis Cia-Cia merupakan salah satu etnis besar di Buton. Tidak banyak hal spektakuler yang membuat kota Bau-Bau demikian dikenal masyarakat nasional maupun internasional selain dari kasus bahasa Cia-Cia yang diajarkan dengan menggunakan aksara tulis Korea yaitu Hangeul.

Kasus ini berawal dari Simposium Pernaskahan Nusantara-IX tahun 2005. Saat itu, seorang Professor Korea bernama Chun Thai Yun meyakini,

ada rahasia menarik di Bau-Bau khususnya keanekaragaman "linguistik" yang ada di daerah tersebut. Ketertarikan Chun ini, terus berlanjut hingga apa yang menjadi fokus ketertarikannya, diceritakan kepada rekan-rekannya di Seoul National University.

Di kampusnya tersebut, ia mempresentasikan ketertarikannya dan mendapat dukungan positif dari dua koleganya yaitu Professor Hu Yung Lee dan Dr. Lee Konam (Abdillah, --). Dengan dukungan penuh dari kampus maupun pemerintahnya, tiga profesor Korea ini, kemudian melakukan berbagai kunjungan, investigasi, dan akhirnya membuahkan sebuah rencana afiliasi konstruktif dengan pihak pemerintah Bau-Bau. Satu hal pokok yang ada dalam rencana afiliasi tersebut adalah adanya upaya mentransformasi bahasa Cia-Cia ke dalam alphabet "Hangeoul" Korea. Sebagai timbal baliknya, Bau-Bau maupun suku dan bahasa Cia-Cia akan di promosikan secara gencar di publik Korea sehingga wisatawan Korea tertarik dan berkunjung ke Bau-Bau. Upaya ini disambut positif oleh walikota Bau-Bau, Drs. Amirul Tamim. Dengan pertimbangan Bau-Bau akan mendapatkan keuntungan ekonomis jika mengadakan afiliasi dengan pemerintah Korea, Drs. Amirul Tamim melakukan perjanjian tertulis dengan pemerintah Korea. Selanjutnya, melalui yayasan HumMinjeongeum, Dr. Lee Konam merilis di berbagai harian terkemuka Korea tentang kabar gembira ini. Langkah-langkah afiliasi ini dianggap sebagai hal yang sangat cerdas hingga layak menduduki peringkat Headline banyak media massa, cetak maupun elektronik di Korea.

Berita di surat kabar inilah yang menjadikan perjanjian pemerintah Bau-Bau dengan pemerintah Korea mengenai bahasa Cia-Cia dikenal luas. Berita ini tidak hanya mendapat komentar beragam dari media di Korea dan Indonesia yang menjadi pelaku utama perjanjian, negara-negara lainpun yang turut mengetahui hal ini memberi respon beragam. Jurnalis AS, Tom Wright datang khusus ke Bau-Bau untuk mewawancarai walikota Amirul Tamim hanya sekedar mendapatkan berita tentang bahasa Cia-Cia. Negara Jepang sebagai negara yang merasa lebih superior dari Korea dan telah lama masuk ke Indonesia, juga menunjukkan rasa penasarannya dan mengirimkan beberapa wartawan untuk menanyakan mengapa pemerintah Bau-Bau mau bekerja sama dengan pemerintah Korea sedang dengan pemerintah Jepang tidak. Bahkan entah ada hubungannya dengan kasus bahasa Cia-Cia atau tidak, sedikitnya 16 orang dari Jerman, didampingi tujuh pendeta melakukan aksi sosial dengan mengambil Bau-Bau sebagai tempat aksi sosial tersebut (Tamam, 2009).

Ditandatanganinya afiliasi antara pemerintah Bau-Bau dan Korea menimbulkan banyak kontroversi. Pihak yang mendukung afiliasi tersebut berdiri pada pijakan ekonomi dengan sebuah alasan logis bahwa afiliasi tersebut dapat mengundang investor maupun wisatawan Korea untuk datang ke Indonesia. Selain itu dengan berpijak pada aspek perbaikan mutu pendidikan, semangat yang besar dari Profesor Chun Thai Yun penggagas afiliasi untuk memasukkan aksara Hangeul dalam pengajaran bahasa lokal Cia-Cia dianggap dapat berperan meningkatkan mutu pendidikan. Logikanya, untuk mengajarkan huruf Hangeul dengan cepat dan tepat, professor Chun Thai Yun bersama timnya akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan metode pembelajaran inovatif yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan cepat dan tepat pula. Adanya metode

pembelajaran inovatif ini diharapkan dapat berdampak positif pada dunia pendidikan di kota Bau-Bau karena teknologi-teknologi pendidikan baru yang dimiliki Korea serta tidak dimiliki Bau-Bau akan diterapkan dan diwariskan pada kota tersebut.

Pihak yang kontraafiliasi di lain pihak juga memiliki alasan yang kuat. Mereka menggunakan dasar kekhawatiran mereka bahwa apa yang sedang dikerjakan pakar-pakar bahasa dari Korea merupakan bentuk-bentuk penjajahan model baru. Kegiatan inipun juga dianggap sebagai kegiatan kontrakonservasi bahasa Cia-Cia, karena ketika pemerintah Bau-Bau memberikan kesempatan pada pakar-pakar pendidikan Korea untuk berkerja melaksanakan proyeknya, mereka diperkirakan tidak hanya akan mengajarkan aksara Hangeul, tapi juga bahasa Korea dan budayanya. Asumsi umum yang berlaku adalah tidak mungkin mengajarkan aksara yang dimiliki sebuah bahasa tanpa mengajarkan bahasa dari aksara tersebut, dan sangat sulit untuk mengajarkan sebuah bahasa tanpa menyertakan aspek-aspek budaya yang dimiliki penutur bahasa tersebut. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena bisa jadi masyarakat Bau-Bau akan meninggalkan bahasa Cia-Cia dan berganti menggunakan bahasa Korea. Di samping itu, dengan adanya pengajaran aksara Korea ini, dikhawatirkan budaya-budaya Korea yang bisa jadi tidak cocok dengan budaya suku Cia-Cia dan budaya Indonesia pada umumnya akan masuk dan mengikis budaya lokal masyarakat Bau-Bau utamanya suku Cia-Cia. Kelak budaya Cia-Cia akan terpinggirkan dan akhirnya punah. Pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan sisi negatif dibalik gemerlap janji-janji kemajuan ekonomi inilah yang diungkap dalam artkel ini.

Pengajaran Bahasa Cia-Cia dengan Huruf Hangeul: Sebuah Kebijakan yang Kurang Bijak

Ada enam hal mengapa mengajarkan aksara Hangeul dianggap sebagai langkah kurang bijak yang dapat mempercepat kepunahan bahasa Cia-Cia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Ketujuh hal tersebut dipaparkan dalam enam paragraf berikut.

Hal pertama berhubungan dengan Undang-undang Kebahasaan yaitu UU No. 24 tahun 2009. Pada Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijelaskan tata caranya pada ayat 2 yaitu dilakukan dengan cara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. Pada kasus Cia-Cia, terlihat jelas bahwa pemerintah Bau-Bau melakukan pelanggaran terhadap kedua ayat pada pasal 34 ini. Pemerintah Bau-Bau jelas secara sengaja tidak melakukan perlindungan terhadap bahasa Cia-Cia yaitu dengan membiarkan bahasa dan aksara Korea diajarkan pada suku Cia-Cia (pelanggaran pasal 1). Selain itu, pemerintah Bau-Bau melakukan kejasama ini tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan lembaga kebahasaan, dalam hal ini adalah Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional atau Balai Bahasa setempat (pelanggaran pasal 2), dan ini adalah

jelas sebuah pelanggaran pelanggaran konstitusi yang dapat berakibat adanya tuntutan hukum bagi pemerintah daerah Bau-Bau.

Hal kedua berhubungan dengan politik bahasa. Dalam perspektif politik bahasa, mengizinkan tawaran pemerintah Korea untuk “mengkoreakan” bahasa Cia-Cia dengan cara mengajarkan aksara Hangeul kepada suku Cia-Cia seakan membuka pintu lebar-lebar kepada bangsa lain untuk berbuat yang serupa. Pemerintah Jepang yang sangat menggebu-gebu menunggu kesempatan serupa, pastinya akan menggunakan kasus Cia-Cia untuk merongrong pemerintah Republik Indonesia agar diizinkan melakukan hal serupa. Jika pemerintah Jepang tidak diizinkan, berarti pemerintah Indonesia pilih kasih, dan ini dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral dua negara. Bila diizinkan, maka akan ada banyak bangsa lain yang akan menawarkan hal serupa. Sangat ironis jika Indonesia yang selama ini dikenal kaya akan bahasa lokal kemudian berubah statusnya menjadi kaya karena menampung bahasa dan sistem tulisan negara-negara lain. Bantuan ekonomi dan promosi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Koreapun sebagai timbal balik dari pengajaran bahasa Hangeul juga dapat berakibat negatif pada bahasa dan budaya Cia-Cia. Ketika banyak wisatawan maupun pemegang modal Korea datang ke Bau-Bau, sedangkan masyarakat Bau-Bau tidak siap, maka akan menyebabkan apa yang disebut *cultural shock*, *languange shock*, dan *mind shock* (shock budaya, bahasa, dan pikiran) yang apabila tidak hati-hati dapat berdampak negatif pada pudarnya penggunaan bahasa dan budaya Cia-Cia karena proses asimilasi budaya yang ekstrem.

Hal ketiga berhubungan dengan budaya. Seperti yang telah disebutkan di atas, mengajarkan aksara Hangeul tidak mungkin bisa tanpa mengajarkan bahasa Korea. Mengajarkan bahasa Korea (yang telah baku) berarti pula mengajarkan tata bahasa Korea dan aspek-aspek linguistik lainnya. Jika hal-hal ini terjadi, interferensi bahasa Korea terhadap bahasa Cia-Cia akan sangat mungkin terjadi. Selain itu, mengajarkan bahasa Korea tidak mungkin pula dilakukan tanpa mengajarkan budayanya. Posisi budaya Korea yang lebih kuat (karena budaya bangsa dan bukan suku) akan menghegemoni budaya Cia-Cia, dan pada akhirnya budaya Cia-Cia akan hilang.

Hal keempat berhubungan dengan aspek pendidikan. Jika proses pembelajaran di Cia-Cia dilakukan dengan menggunakan aksara Hangeul, dan tiap siswa Cia-Cia lebih fasih menggunakan huruf Hangeul daripada huruf latin, maka hal ini tentu saja tidak baik bagi lulusan sekolah Cia-Cia, utamanya lulusan yang akan melanjutkan ke sekolah yang berada di luar daerah Cia-Cia. Bisa jadi, siswa dari Cia-Cia ini akan tertinggal dari siswa daerah lain karena kekurangmahirannya dalam menulis dengan huruf latin. Hal ini tentu saja ini dapat memperburuk kualitas pendidikan rakyat Cia-Cia

Hal kelima berhubungan dengan kemurnian bahasa Cia-Cia. Sistem aksara Hangeul bisa jadi berbeda dengan sistem bahasa lisan bahasa Cia-Cia. Untuk mencocokkan dua sistem berbeda ini dapat dilakukan dua cara, yaitu: (1) memodifikasi aksara Korea sehingga cocok engan bahasa Cia-Cia, atau (2) memodifikasi bahasa Cia-Cia sehingga cocok dengan aksara Korea. Apapun pilihannya, salah satu dari sistem ini harus mengalah dan

mengalami modifikasi, sehingga output dari program ini adalah bahasa Cia-Cia yang ditulis dengan Aksara Hangeul yang sudah tidak murni lagi.

Hal keenam berhubungan dengan penelitian Linguistik. Penggunaan huruf Hangeul dapat menyulitkan proses kodifikasi dan perekaman bahasa yang dilakukan oleh linguis, etnolinguis, dialektologis nusantara. Kesulitan ini muncul karena untuk mempelajari bahasa Cia-Cia, para linguis nusantara harus melewati dua tahapan sulit yaitu mempelajari tulisan terlebih Hangeul dahulu baru kemudian mempelajari bahasa Cia-Cia itu sendiri. Ketika Linguis nusantara dihadapkan pada data-data tulis yaitu data-data bahasa Cia-Cia yang ditulis dengan menggunakan aksara Hangeul, linguis Nusantara tidak bisa tidak harus menguasai bahasa Korea dan aksara Hangeul untuk dapat memahami data-data tersebut. Ini jelas memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Solusi terhadap Kasus Bahasa Cia-Cia

Artikel ini terkesan kurang sempurna jika hanya memaparkan fakta yang berkaitan dengan permasalahan bahasa Cia-Cia tanpa menyumbangkan ide-ide sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada bagian ini dipaparkan beberapa fase yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perjanjian kesepahaman yang telah ditandatangani oleh pemerintah Korea dan pemerintah daerah Bau-Bau sulit (meskipun sebenarnya bisa) untuk diakhiri dengan segera tanpa membawa konsekuensi negatif pada pemerintah daerah Bau-Bau. Nota kesepahaman telah ditandatangani dan menghentikan kerjasama secara sepihak ini akan lebih banyak mengundang permasalahan daripada manfaat, sehingga tiada jalan lain selain melanjutkan kerjasama tersebut. Ironisnya, jika kerjasama ini tidak segera diputus, hal-hal negatif yang dikhawatirkan banyak pemerhati bahasa akan punahnya bahasa dan budaya Cia-Cia akan segera terjadi, sehingga keputusan kerja sama ini tidak bisa tidak harus dilakukan. Dua pilihan ini bagaikan buah simalaka. Memilih opsi yang pertama yaitu melanjutkan kerja sama berarti mempertaruhkan masa depan bahasa dan budaya Cia-Cia. Memilih opsi yang kedua yaitu memutuskan kerjasama secara sepihak, maka kerugian materiil akan tampak di depan mata. Dua pilihan yang sangat berat untuk diambil pemerintah kabupaten Bau-Bau

Solusi yang ditawarkan pada artikel ini adalah opsi ketiga yaitu berada di tengah antara menghentikan atau melanjutkan kerjasama. Konkretnya, solusi ini menghendaki adanya kelanjutan kerjasama antara pemerintah Bau-Bau dengan pihak Korea yang diimbangi dengan upaya sistematis konservasi bahasa Cia-Cia. Kerjasama antara pemerintah Bau-Bau dengan pemerintah Korea dapat terus dipertahankan karena hal ini adalah kesalahan yang tak mungkin dapat diperbaiki secara cepat. Tindakan yang bisa dilakukan pemerintah Bau-Bau adalah tindakan meminimalisir aspek-aspek negatif yang diprediksikan akan terjadi ketika proses kerjasama tersebut terjadi. Adapun tahapan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir aspek-aspek negatif yang mungkin terjadi selama proses pengajaran tulisan Hangeul ini adalah:

- 1) Pembentukan tim konservasi bahasa Cia-Cia oleh pemerintah Bau-Bau dengan menggandeng Balai Bahasa terdekat atau Pusat Bahasa

Republik Indonesia sebagai rekan kerja. Fungsi Balai Bahasa atau Pusat Bahasa di sini adalah sebagai konsultab (*planner* dan *evaluator*) sekaligus juga bila dibutuhkan dapat berperan sebagai pelaksana (*actor*) upaya konservasi. Tim ini bertanggungjawab untuk memikirkan, merumuskan dan mengambil langkah-langkah strategis pemertahanan bahasa Cia-Cia tanpa harus memutuskan kerja sama dengan pemerintah Korea.

- 2) Setelah tim terbentuk, tim ini harus segera menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk melakukan tindakan konkret yang berhubungan dengan konservasi bahasa
- 3) Tim ini harus dapat menggenggam dukungan dari pemerintah daerah dan rakyat Bau-bau, karena tanpa dukungan yang besar, masalah Cia-Cia tidak akan terselesaikan.
- 4) Adapun aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh tim ini dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah (1) memastikan bahwa pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) yang menyatakan bahwa (a) pengajaran bahasa Hangeul hanya dilakukan pada matapelajaran muatan lokal bahasa Cia-Cia saja, (b) untuk mata pelajaran lainnya wajib disampaikan dengan bahasa pengantar lisan bahasa Indonesia atau Cia-Cia, dengan sistem tulis adalah sistem latin, (2) memastikan bahwa tuturan bahasa Cia-Cia apapun yang ditulis dalam bahasa Hangeul harus didampingi oleh tulisan dengan sistem penulisan aksara latin. Ini untuk memastikan bahwa siswa Cia-Cia kenal juga pada huruf latin.
- 5) Tim harus dapat mendelegasikan beberapa orang (subtim) untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengajaran aksara Hangeul. Subtim ini tidak hanya berfungsi sebagai monitorer proses pengajaran namun juga berfungsi petugas magang program kerjasama pengajaran aksara Hangeul tersebut. Dengan terlibat dalam proses pengajaran aksara Hangeul, subtim ini pastinya akan belajar aksara Hangeul dan bahasa Korea. Kelak pengetahuan (berupa metode pengajaran Hangeul yang praktis) yang subtim ini dapatkan selama proses kerjasama dengan pemerintah Korea dapat digunakan untuk mengembangkan bahasa Cia-Cia dengan menggunakan sistem tulis latin
- 6) Setelah masa berlaku kerjasama habis, tim konservasi harus dapat mendesak pemerintah Bau-Bau untuk menyatakan diri tidak melanjutkan kontrak kerjasama.
- 7) Kerja tim ini masih belum berakhir meskipun kerjasama pemerintah Bau-Bau dan Korea telah berakhir. Tim konservasi harus dapat melakukan langkah-langkah konservasi lanjut karena meskipun kerjasama pemerintah Bau-Bau telah selesai, status bahasa Cia-Cia yang bukan bahasa resmi menjadikan bahasa Cia-Cia masih rentan punah. Adapun langkah-langkah lanjut yang harus dilakukan terbagi dalam empat fase (lihat Azhar, 2009) yaitu: (1) Standarisasi Bahasa Cia-Cia yaitu melakukan kodifikasi atau pembakuan bahasa Cia-Cia dibidang ejaan, istilah, tatabahasa dan leksikon sehingga kerancuan yang terjadi dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya menuliskan kata dalam bahasa Cia-Cia dengan menggunakan aksara latin tidak terjadi. (2) Renaisansi buku berbahasa Cia-Cia yaitu dengan

cara memberikan kesempatan kepada kaum intelektual, sastrawan, pendidik, budayawan Cia-Cia untuk menulis buku sastra berbahasa Cia-Cia seperti kumpulan syair, dongeng dan pantun berbahasa Cia-Cia dengan menggunakan huruf Latin. (3) Promosi sastra dan budaya Cia-Cia melalui berbagai media seperti surat kabar dan televisi. Forum-forum resmi seperti seminar, lokakarya dan konferensi tentang sastra Cia-Cia harus diagendakan secara rutin tiap tahun. (4) Konservasi Sastra Cia-Cia dengan cara melakukan kegiatan inventarisasi, penelitian di bidang sastra dan bahasa, dan diskusi-diskusi tentang Cia-Cia.

- 8) Ketika kebugaran (*fitness*) dan sintasan (*survival*) bahasa Cia-Cia telah didapat, maka tim ini dapat dibubarkan. Selama masa kerjanya, tim konservasi harus dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk mengelurakan kebijakan dan penegasan pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia bahwa kerjasama dengan pemerintah asing semacam kerjasama pemerintah Bau-Bau dengan pemerintah Korea adalah salah dan melanggar Undang-Undang, dan kesalahan selanjutnya tidak akan ditolelir.

Simpulan

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Bahasa Cia-Cia adalah salah satu bahasa lokal yang sedang berada diambang kepunahan. Statusnya sebagai bahasa lokal ditambah faktor-faktor lainnya seperti kondisi masyarakat Cia-Cia yang agak tertinggal menyebabkan bahasa ini berada dalam tingkat kepunahan yang tinggi. Adanya kerjasama pemerintah Bau-Bau untuk mengajarkan aksara Hangeul kepada masyarakat Cia-Cia tidak saja dinilai kontrakonservasi, langkah ini dapat menyebabkan waktu kepunahan bahasa Cia-Cia semakin cepat.
- 2) Ada tujuh alasan yang menyebabkan kerjasama pemerintah Bau-Bau dengan pemerintah Korea dinilai sebagai kebijakan yang tidak bijak yaitu: (1) kebijaksanaan ini bertentangan dengan Undang-undang Kebahasaan yaitu UU No. 24 tahun 2009. Pada Pasal 42 ayat 1 dan 2, (2) kebijaksanaan ini tidak baik bila ditinjau dari kacamata politik bahasa karena dapat mengundang kecemburuan negara lain yang memiliki obsesi yang sama untuk mempromosikan bahasanya di Indonesia (3) mengajarkan bahasa Korea tidak mungkin pula dilakukan tanpa mengajarkan budayanya, dan karenanya, hal ini dapat mengancam eksistensi bahasa Cia-Cia (4) tidak baik bagi generasi muda Cia-Cia karena ketika generasi ini tidak terbiasa dengan aksara Latin sedangkan lingkungan sosial secara nasional utamanya lingkungan dunia kerja menuntutnya seperti itu, maka ia akan kalah bersaing dengan generasi muda dari daerah lain (5) pengajaran Cia-cia aksara Hangeul dapat menyebabkan kemurnian bahasa Cia-Cia menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali, dan (6) menyulitkan para linguis nusantara untuk melakukan penelitian dan kodifikasi bahasa Cia-Cia.
- 3) Adapun langkah yang dinilai paling bijak yang dapat diambil adalah dengan tetap mempertahankan kerjasama pemerintah Bau-Bau dengan

pihak Korea yang diiringi oleh adanya sebuah usaha konservasi terstruktur seperti pembentukan tim konservasi yang bekerja dengan serius melakukan kegiatan konservasi bahasa Cia-Cia sampai menunggu waktu kerjasama pemerintah bau-bau dengan korea berakhir.

Referensi

- Abdillah, M. Gunawan.--. *Menyingkap Rahasia Keunikan Bahasa Cia-Cia*. http://klikp21.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1586:menyingkap-rahasia-keunikan-bahasa-Cia-Cia&catid=113:nusantara&Itemid=115. Diakses 29 Juni 2010
- Azhar, N, Iqbal. 2009. dalam *Bahasa dan Sastra Dalam Konteks Kearifan Lokal: Penyerapan Kosakata Bahasa Madura Sebagai Strategi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kanzun
- Collins, James. T. 2006. *Bahasa yang Terancam Punah: Tinjauan di Maluku dan Kalimantan*. Makalah pada Seminar Internasional Pelestarian Bahasa Daerah. Jakarta
- Darwis, Muhammad. 2007. "Hubungan Antara Pemertahanan Bahasa dan Budaya Daerah" dalam Prosiding Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Pusat Bahasa, Depdiknas dan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.
- Hakim, Zainuddin. 2010. "Kepunahan Bahasa: Tanggungjawab Siapa?" dalam Prosiding Seminar Internasional Menyelamatkan Bahasa Ibu Sebagai Kekayaan Budaya Nasional. Bandung: Balai Bahasa Bandung
- Firmansyah. 2010. *Keterancaman Bahasa Komering oleh Aspek-Aspek Budaya Komering: Studi Kasus Bahasa Komering Betung, Okut, Sumsel*. dalam Prosiding Seminar Internasional Menyelamatkan Bahasa Ibu Sebagai Kekayaan Budaya Nasional. Bandung: Balai Bahasa Bandung
- Grimes. F. Barbara. 2009. *Bahasa-Bahasa Minahasa: Tahap Terakhir Menuju Kepunahan*. <http://pnglanguages.org/sosiolx/ndg-lg-grimes/articles.html>. Diakses 29 Juni, 2009
- Gunarwan, Asim. 1999. "Kedudukan Bahasa Daerah dan Tantangan pada Abad yang Akan Datang" dalam Prosiding Kongres MLI IX. Jakarta
- Kompas, 21 September 2007
- Laporan Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Di Sulawesi Selatan tahun 2007. Makassar: Pusat Bahasa, Depdiknas dan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.
- Mukhamdanah. 2010. "Satu Bahasa Ibu di Indonesia Telah Punah (lagi): Kasus Bahasa Tandia di Teluk Wondama." dalam Prosiding Seminar Internasional Menyelamatkan Bahasa Ibu Sebagai Kekayaan Budaya Nasional. Bandung: Balai Bahasa Bandung
- SIL. 2006. *Bahasa-Bahasa di Indonesia: Languages of Indonesia*. SIL International Cabang Indonesia
- Tamam, Amirul. 2009. *Wartawan AS Buat Liputan Bahasa Cia-Cia*. <http://amirultamim.info/home/berita/view/144/>. Diakses 29 Juni 2010

Yamaguchi, Masao. 2006. *Bahasa Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang Terancam Punah*. Makalah pada Seminar Internasional Pelestarian Bahasa Daerah. Jakarta.

